



**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA TAON MARISI KECAMATAN
HABINSARAN KABUPATEN TOBA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

NOVA ELISHA ROMITHO SILAEN
1915106009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TAON MARISI KECAMATAN
HABINSARAN KABUPATEN TOBA

NAMA : NOVA ELISHA ROMITHO SILAEN
N.P.M : 1915100009
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 11 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Drs Maryani, MSI., Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVA ELISHA ROMITHO SILAEN
Tempat / Tanggal Lahir : Tornagodang / 14-05-1998
NPM : 1915100009
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : TAON MARISI

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Mei 2024



NOVA ELISHA ROMITHO SILAEN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Elisha Romitho Silaen
Npm : 1915100009
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI DESA TAON MARISI
KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN
TOBA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (*plagiat*).
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Nova Elisha Romitho Silaen
NPM 1915100009

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba”. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Desa dan Perwakilan Warga Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba yang berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan Total Sampling yaitu 40. Nilai t_{hitung} Transparansi sebesar 7,171 sehingga diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $7,171 > 2,028$ nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya variabel Transparansi (X1) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Diperoleh t_{hitung} Akuntabilitas sebesar 2,868 maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,868 > 2,028$, nilai signifikansi $0,007 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel Akuntabilitas (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan F_{hitung} sebesar 194,700 F_{tabel} 3,25. Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

This research is entitled "The Influence of Transparency and Accountability on Village Financial Management in Taon Marisi Village, Habinsaran District, Toba Regency". Transparency and Accountability in Village Financial Management is still relatively low. This research aims to determine the influence of transparency (X1) and accountability (X2) on village financial management (Y). This research uses a quantitative descriptive approach. The population in this study was all Village Apparatus and Resident Representatives of Taon Marisi Village, Habinsaran District, Toba Regency, totaling 40 people. The sampling technique in the research was carried out with Total Sampling, namely 40. The Transparency tcount was 7.171, so we got $t_{count} > t_{table}$ or $7.171 > 2.028$, a significance value of $0.000 < 0.05$, meaning that the Transparency variable (X1) partially had a significant effect on Village Financial Management. Obtained Accountability tcount of 2,868 then obtained $t_{count} > t_{table}$ or $2,868 > 2,028$, significance value $0.007 < 0.05$. So H_0 is rejected and H_a is accepted, which means that the Accountability variable (X2) partially has a significant effect on Village Financial Management. The results of the F test showed a significance value of $0.000 < 0.05$ and Fcount of 194,700 F_{table} 3.25. Transparency and Accountability have a significant influence on Village Financial Management in Taon Marisi Village, Habinsaran District, Toba Regency.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Financial Management

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba”**.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Mariyam, MSi., Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Parasman Silaen selaku Kepala Desa dan Bapak Ronalis Silaen selaku Sekretaris yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan riset di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.
7. Yang tercinta Kedua Orang tua penulis Ayahanda Redison Silaen dan Ibunda Ratna Purba yang selalu memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis selama kuliah di Universitas Pembangunan Panca Budi.
8. Kepada Saudara penulis Kakak Lilis S Silaen, A.Md., Abang Bastian Van Roy Silaen, A.Md., dan Adek saya Silvia Agnes Silaen yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Terimakasih kepada Teman penulis Rumada P H Pane, A.Md dan Damayanti br Pardede yang memberikan bantuan dan semangat kepada penulis selama kuliah dan turut serta membantu dalam proses pengerjaan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi semua pihak.

Medan, Mei 2024
Penulis

Nova Elisha Romitho Silaen
NPM 1915100009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5.1 Tujuan Penelitian	7
1.5.2 Manfaat Penelitian	8
1.6 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori <i>Good Governance</i>	10
2.2 Transparansi	13
2.2.1 Pengertian Transparansi	13
2.2.2 Karakteristik Transparansi	15
2.2.3 Prinsip Transparansi	15
2.2.4 Indikator Transparansi	16
2.3 Akuntabilitas	16
2.3.1 Pengertian Akuntabilitas	16
2.3.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas	18
2.3.3 Indikator Akuntabilitas	19
2.4 Pengelolaan Keuangan Desa.....	21
2.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.4.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa	25
2.4.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	25
2.5 Penelitian Terdahulu	28
2.6 Kerangka Konseptual.....	31
2.7 Hipotesis.....	32
BAB III: METODE PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan Penelitian	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.2.1 Tempat Penelitian	36

3.2.2 Waktu Penelitian	36
3.3 Populasi dan Sampel	37
3.3.1 Populasi.....	37
3.3.2 Sampel	39
3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	39
3.4.1 Variabel Penelitian	39
3.4.2 Devenisi Operasional Variabel	40
3.5 Jenis dan Sumber Data	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data	42
3.7.1 Uji Kualitas Data	42
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	44
3.7.3 Uji Regresi Linier Berganda	46
3.7.4 Uji Hipotesis	47
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran dan Objek Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Desa Taon Marisi.....	50
4.1.2 Visi dan Mis Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba	51
4.1.3 Strktur Organisasi Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba	52
4.2 Penyajian Data	56
4.3 Analisa Data	56
4.4 Hasil Uji Kualitas Data	57
4.5 Uji Asumsi Klasik	60
4.6 Analisis Regresi Linier Berganda	64
4.7 Uji Hiopotesis	66
4.8 Pembahasan	68
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	
BIODATA MAHASISWA	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Penyaluran Dana Desa Taon Marisi Periode 2020-2022.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian.....	36
Tabel 3.2	Data Populasi Penelitian.....	37
Tabel 3.3	Operasional Variabel.....	40
Tabel 3.4	Skala Likert.....	41
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Taon Marisi	50
Tabel 4.2	Demografi Responden	56
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas Transparansi (X1)	58
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X2)	58
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	59
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas.....	59
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	61
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas.....	63
Tabel 4.9	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
Tabel 4.10	Hasil Uji t (Parsial)	66
Tabel 4.11	Hasil Uji F (Simultan).....	67
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	22
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Taon Marisi.....	53
Gambar 4.2 Uji Normalitas P-P Plot	61
Gambar 4.3 Uji Normalitas Histogram	62
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisita.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berperan besar dalam membentuk program pelayanan dan kebijakan publik. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Undang-Undang Desa) menyebutkan bahwa tujuan dari pengaturan tentang Desa yaitu untuk meningkatkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pengaturan keuangan desa. Maka tanggung jawab pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan program-program yang bernilai ekonomi tetapi yang lebih utama untuk mengetahui apakah program dan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan keinginan publik dan tidak membatasi ruang gerak masyarakat untuk bisa berkreasi secara produktif. Tingkat kehidupan masyarakat secara individual diharapkan bisa bertambah baik dan maju atas kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan diiringi dengan kinerja pemerintah yang baik.

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menguatkan kembali bentuk pemberian otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Otonomi desa dapat diartikan sebagai hak, wewenang serta kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Salah satu hak desa yang dimaksud dalam Undang-undang Desa ialah hak untuk mengelola keuangan desa serta mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (M. Baharuddin Umar, 2019).

Pemberian hak dan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa belum seimbang dengan jumlah perangkat pemerintah desa yang

memahami pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan desa, (Setyoko, 2016). Kurangnya pemahaman akuntansi serta kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan keuangan desa nantinya (M. Baharuddin Umar, 2019). Padahal kegiatan pelaporan keuangan sangatlah penting guna mewujudkan akuntabilitas dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik, tentunya pemerintah dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat membantu menghindari permasalahan tersebut. Transparansi berarti bahwa informasi tentang pengelolaan keuangan desa harus tersedia untuk publik secara terbuka dan mudah diakses. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah desa harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan harus siap untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada publik.

Desa merupakan salah satu bagian dari unit organisasi pemerintah yang berpengaruh penting di lingkungan masyarakat serta berhadapan langsung dengan masyarakat dalam segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan yang mempunyai peranan strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Desa sebagai bagian dari pemerintahan di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola anggaran dan keuangan desa. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan masalah dalam pengelolaan keuangan desa yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran desa. Beberapa masalah tersebut

antara lain, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, terjadinya penyelewengan dan korupsi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas memegang peranan penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Dengan transparansi, semua informasi tentang pengelolaan keuangan desa harus tersedia bagi masyarakat secara sederhana dan transparan. Dalam hal pertanggungjawaban, pengelola keuangan desa harus mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran desa dan menjelaskan secara rinci semua pengeluaran yang dilakukan.

Beberapa studi dan penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Harjono, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran baik secara individu maupun bersama.

Selain dari itu beberapa penelitian juga menyatakan pengelolaan keuangan desa saat ini masih belum melaksanakan musyawarah desa secara maksimal, seperti yang diungkapkan Risyah Umami dan Idang Nurodin (2017) dalam jurnal ilmiah ilmu ekonomi, hal tersebut terjadi pada desa-desa di kecamatan Surade tepatnya di desa Jagamukti, Gunungsungging, Cipeundeuy dan Sukatani, yaitu pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29 menyatakan formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi.

Kecamatan Habinsaran terdiri dari 21 desa dan 1 kelurahan yang terbagi habis dalam 120 dusun. Kelurahan Parsoburan Tengah adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Kecamatan Habinsaran.

Desa Taon marisi merupakan desa terkecil yaitu 5,51 km² dan memiliki penduduk sebanyak 497 jiwa dan terdapat 132 KK.

Berikut penyaluran Dana Desa Taon Marisi periode 2020-2022:

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Desa Taon Marisi Periode 2020-2022

No	TAHUN	ANGGARAN PENDAPATAN DESA	REALISASI PENDAPATAN DESA
1.	2020	Rp 788.769.000	Rp 777.962.000
2.	2021	Rp 764.165.000	Rp 764.165.000
3.	2022	Rp 700.242.000	Rp 746.652.870

Sumber: Data Desa Taon Marisi Tahun diolah (2023)

Dari tabel laporan diatas dapat dilihat besar anggaran dan realisasi pendapatan desa Taon Marisi sudah termasuk besar untuk desa terkecil di kecamatan habinsaran. Dari besarnya anggaran dana desa tersebut besar harapan masyarakat untuk aparat desa dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Fenomena yang sering terjadi dalam pembangunan desa ialah kurang memperhatikan infrastruktur yang ada di pedesaan seperti sarana dan prasarana kesehatan, sarana transportasi, sarana dan prasarana pendidikan, dan rusaknya jalan menuju areal pertanian. Pembangunan infrastruktur jalan menuju areal pertanian justru harus diperhatikan karena mayoritas masyarakat Desa Taon Marisi memperoleh pendapatan dari pertanian.

Kondisi ini tidak terlepas dari kurangnya tanggung jawab atau akuntabilitas pemerintah, ketidakmampuan memahami penerapan peraturan yang berkaitan dengan dana desa, dan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pemerintah desa. Dalam hal pengawasan tentunya peran masyarakat sangat diharapkan untuk dilibatkan dalam pengawasan kegiatan pemerintah, karena keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa masih tergolong rendah dikarenakan saat melakukan observasi peneliti sulit mendapatkan data mengenai pengelolaan keuangan desa. Peneliti tidak diperbolehkan melihat laporan APBDesa secara terperinci baik dari bentuk laporan keuangan desa, cara memberikan pengkodean laporan keuangan dan yang lainnya, karena perangkat desa tidak ingin menjelaskan tentang angka dan bentuk laporan keuangan desa, bagi mereka hal tersebut hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu, sedangkan peneliti atau masyarakat meminta bukti laporan keuangan tidak diperbolehkan.

Seharusnya Transparansi dilakukan dengan memberikan informasi mengenai laporan keuangan desa seluas-luasnya atau terperinci baik dalam bentuk laporan keuangan desa kepada masyarakat atau publik dan kinerja para aparatur

desa agar tidak terjadi adanya tindakan korupsi atau penyelewengan dana dan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat desa karena kurangnya transparansi atau keterbukaan terhadap publik. Dengan adanya sikap Transparansi dan Akuntabilitas para aparat desa maka dapat mengelola keuangan desa dengan tepat sasaran dan lebih memajukan desa Taon Marisi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan anggaran di sektor publik khususnya pemerintahan desa dengan judul Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba masih tergolong rendah.
2. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba masih tergolong rendah.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba?
3. Apakah Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba

3. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan khususnya tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa dan dijadikan sebagai bahan referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good government* dan *good governance*.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan, dalam melakukan penelitian di bidang sektor publik sesuai dengan teori-teori keuangan yang telah dipelajari sehingga dapat diterapkan pada kejadian nyata.

c. Bagi Almameter

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan bahan referensi atau acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.”**

Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.”**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya yang terletak pada:

1. Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2022 sedangkan penelitian ini ditahun 2023.
2. Tempat penelitian: Penelitian terdahulu di Desa Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Good Governance

Good Governance atau Tata kelola yang baik adalah konsep yang didefinisikan secara berbeda oleh para ahli dan peneliti yang berbeda. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* guna tumbuhnya aktifitas usaha (Hamirul, 2020).

Namun secara umum, teori *good governance* mengacu pada konsep tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan kepentingan publik. Prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.

Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik (Siti Maryam, 2017).

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya membutuhkan partisipasi organisasi masyarakat untuk menyeimbangkan negara (Ardiyanti, 2018).

Namun cita-cita *good governance* kini telah menjadi bagian yang sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah menyediakan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.

Menurut Hamirul (2020), Suatu pemerintahan bisa dinilai baik-buruknya bila telah bersinggungan dengan prinsip *good governance*, diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat

Dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah masyarakat tentunya mempunyai suara dalam pengambil keputusan. Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin suatu kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Pada proses perwujudan *good governance* tentunya diimbangi dengan penegakan *rule of law* dengan karakter: supremasi hukum, hukum yang responsive, kepastian hukum, penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, dan independensi peradilan. Kerangka hukum yang diberlakukan tentunya harus adil tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi ialah keterbukaan mengenai tindakan serta kebijakan oleh pemerintah. Prinsip transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dengan masyarakat dengan penyediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat serta memadai. Selanjutnya transparansi juga dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

4. Peduli pada stakeholder

Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten terhadap dunia usaha merupakan wujud dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki lembaga korporasi yang ada.

5. Berorientasi Pada Konsensus

Ini menyatakan bahwa setiap keputusan dilalui dengan proses musyawarah melalui konsensus. Dimana keputusan ini mengikat dan milik bersama, sehingga mempunyai kekuatan memaksa atas komponen yang terlihat dalam pelaksanaan keputusan tersebut.

6. Kesetaraan

Kesetaraan dimaksudkan atas kebersamaan dalam perlakuan maupun pelayanan, prinsip ini menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi.

7. Efektifitas dan efisiensi

Ini dimaksudkan untuk berdaya guna dan berhasil-guna. efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Agar pemerintahan efektif dan efisien tentunya para pejabat harus bisa menyusun perencanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat serta disusun secara rasional dan terukur.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Bentuk pertanggungjawabannya pun berbeda tergantung dari organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas atas segala tata pemerintahan yang baik serta pembangunan manusia, selanjutnya mereka juga harus paham akan kompleksitas kesejarahan, budaya sosial yang jadi dasar bagi perspektif tersebut.

2.2 Transparansi

2.2.1 Pengertian Transparansi

Menurut penelitian oleh David M. Konisky dan Steven E. Kraft pada tahun 2020, Transparansi adalah kemampuan untuk melihat dan memahami bagaimana keputusan dibuat oleh organisasi atau badan pemerintah. Transparansi dapat dicapai melalui akses publik ke informasi yang relevan dan akurat.

Widyanti (2018) menyatakan, Transparansi adalah pelaksanaan tugas beserta kegiatan yang bersifat transparan atau terbuka untuk masyarakat, dimulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan informasi yang tersedia yang mana informasi tersebut harus memadai sehingga dapat mudah dimengerti dan dipantau.

Transparansi yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015).

Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Garung, Ga, 2020).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

2.2.2 Karakteristik Transparansi

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2018) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut :

a) Informatif.

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

b) Keterbukaan.

Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

c) Pengungkapan.

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

2.2.3 Prinsip Transparansi

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) ada 6 prinsip transparansi, yaitu:

- a). Mudah dalam memahami dan memperoleh informasi (dana, metode pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b). Publikasi dan media tentang proses kegiatan dan detail keuangan
- c). Adanya laporan berkala tentang penggunaan sumber daya dalam pengembangan proyek tersedia untuk umum
- d). Laporan tahunan

- e). Situs web organisasi atau publikasi media
- f). Pedoman rilis informasi

Adanya prinsip transparansi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dalam pemerintahan desa dimana masyarakat dapat mengambil keputusan, misalnya melalui musyawarah desa.

2.2.4 Indikator Transparansi

Dalam peraturan undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri:

1. Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atau akses mengenai pengelolaan keuangan desa.
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun diinformasikan secara tertulis.
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
4. Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Lukito (2014) akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut

langkah seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja. Menurut Wicaksono (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut.

Akuntabilitas merupakan ukuran yang memperlihatkan apakah kegiatan birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung kepada rakyat. Dengan kata lain, bahwa akuntabilitas artinya kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik (Izzah, 2018).

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan guna untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Rizal, et.al (2018) Terdapat beberapa ciri pemerintahan yang akuntabel diantaranya sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

2.3.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2013) terdapat lima jenis akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran (*Accountability for Probitiy and Legality*)
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)
Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

5. Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*Money Public*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2.3.3 Indikator Akuntabilitas

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri dari:

1. Tahap perencanaan
 - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali kota paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa).

- b. Rancangan RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
 - c. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
 - d. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.
3. Tahap Penatausahaan
- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - b. Penatausahaan melaksanakan setiap pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran buku kas umum.
 - c. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
 - d. Sekretaris Desa melaorkan hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.
4. Tahap Pelaporan
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
 - b. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
 - c. Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

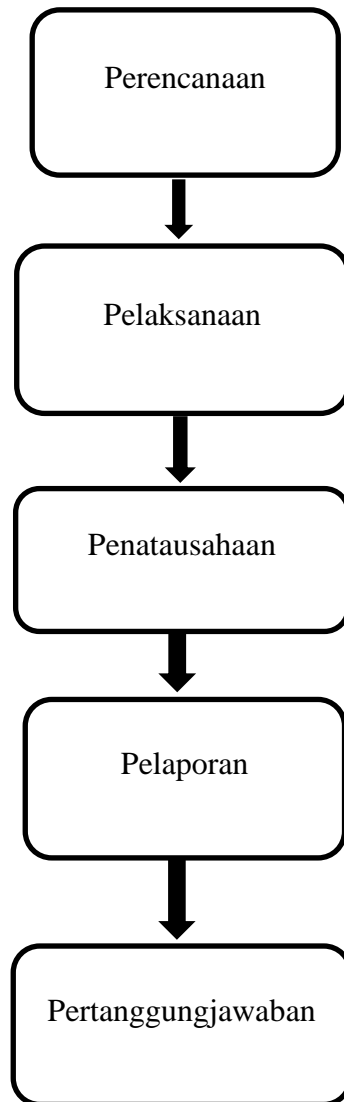
5. Tahap Pertanggungjawaban
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - c. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
 - d. Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa.

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2014) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan.

- a. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lama Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

3. Penatausahaan

Menurut Lapananda (2016), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh

dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.
 - c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan.
4. Pelaporan

Menurut (Mamuaya, dkk: 2017), Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

5. Pertanggungjawaban

Menurut (Mamuaya, dkk: 2017), Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota. Serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan

kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

2.4.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa

Indriyani (2018), menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran dilakukan secara ekonomis. Anggaran harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tidak boleh melebihi keseimbangan antara pembiayaan dan pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif. Anggaran harus digunakan dengan benar dan disusun masyarakat sesuai dengan logika, efisiensi, tepat guna dan waktu, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan.
3. Pengelolaan anggaran dilakukan secara merata. Anggaran harus digunakan secara merata untuk kepentingan semua kelompok masyarakat.

2.4.3 Asas- Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman (Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, 2014). Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.

2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialisitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

10. Asas value for money yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Asas kepatutan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.

17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Dadang Kurnia, 2015) yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan, referensi juga perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
1.	Andika Subandra, Usdeldi, dan Eri	Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat	Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat	Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi

	Nofriza/2022	Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir			Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
2.	Ediska Harosa Putri, Witra Maison, dan Rita Dwi Putri/2022	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Seluruh Nagari Di Kecamatan X Kota Singkarak Kabupaten Solok)	Transparansi dan Akuntabilitas	Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di seluruh Nagari Kecamatan X Koto Singkarak mempengaruhi pengelolaan keuangan desa di seluruh Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak.
3.	Riska Dwi Astuti/2021	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desatamalate Kabupaten Takalar	Transparansi dan Akuntabilitas	Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi dan Akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan desa di

					Desatamala te Kabupaten Takalar.
4.	Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani/ 2019	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)	Transparansi dan Akuntabilitas	Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.
5.	Lara Aryanti/202 2	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.	Akuntabilitas dan Transparansi	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Akuntabilitas dan Transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan Pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif yang ditetapkan (Sugiyono, 2022).

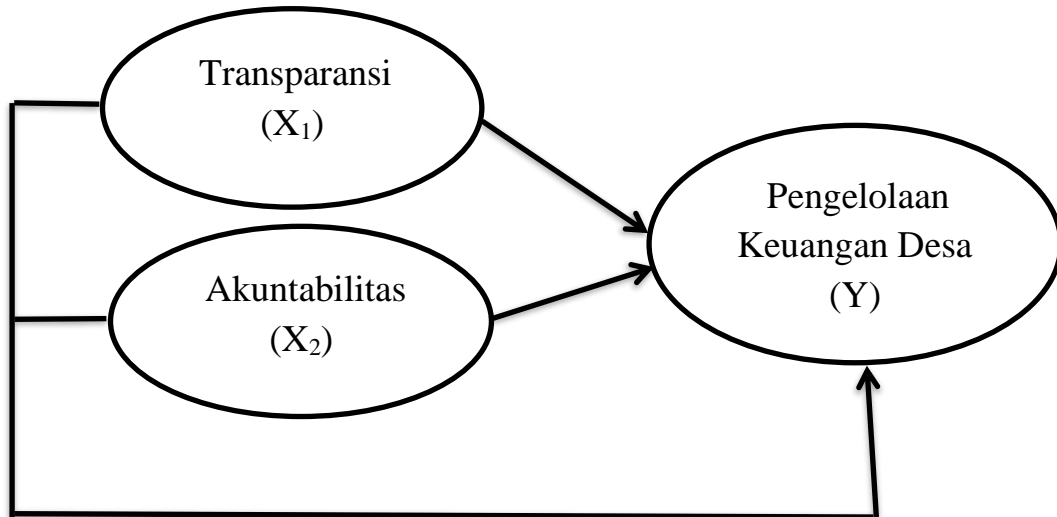
Menurut UU No.17 Tahun 2013 Pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan.

Prinsip- prinsip tata kelola keuangan yang mengedepankan *good financial governance* (GFG) menitikberatkan pada:

1. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban: Pengaruh Secara Parsial: Pengaruh Secara Simultan Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Transparansi (X₁) Akuntabilitas (X₂),
2. Adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, semua dokumen anggaran harus dapat diakses oleh publik, dan yang tidak boleh diakses hanya rekening Koran dan ketersediaan uang dalam kas daerah,
3. Adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, semua pengeluaran dan penggunaan belanja harus dapat dipertanggungjawabkan,
4. Adanya keadilan dalam pengelolaan anggaran, semua alokasi anggaran untuk belanja publik dan aparatur harus mengedepankan prinsip keadilan dan tidak diskriminatif (*nondiscrimination*). (Hendratami, 2017).

Kerangka konseptual mengenai hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Sumber: penulis 2023

Dari kerangka berpikir diatas di dapatkan keterangan sebagai berikut:

1. Transparansi memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
2. Akuntabilitas memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
3. Transparansi dan Akuntabilitas memiliki pengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiono, 2022).

1. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa

Risya dkk (2017) menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Risya dkk (2017) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Widhiyani dkk (2016), dalam hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan kuat terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa kabupaten klungkung dan mempunyai hubungan antara variabel-variabel tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan pengelolaan keuangan desa. Artinya prinsip transparansi telah dilaksanakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti akan menarik hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.**
- H₀ : Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.**

2. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa

Risya dkk (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Risya dkk (2017) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa

akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Widhiyani (2016) dalam hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa kabupaten klungkung dan hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah kuat. Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Artinya prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.

H₀ : Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.

3. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan

Desa

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Risya dkk (2017) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. yaitu sebesar 63,68% terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 36,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Widhiyani (2016) dalam hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa kabupaten klungkung dan hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah kuat. Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Artinya prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dilaksanakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

- H₃ : Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.**
- H₀ : Transparansi dan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitatif. Metode Kuantitatif merupakan penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiono, 2022).

Dengan pendekatan Kuantitatif tersebut dapat mengetahui pengaruh variabel bebas (Transparansi dan Akuntabilitas) terhadap Variabel terikat (Pengelolaan Keuangan Desa).

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dari bulan Maret 2023 sampai dengan selesai dengan format sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Jenis kegiatan	Feb	Mar-Apr	Mei-Jun	Juli	Agt-Sep	Okt	Nov - Jan	Feb	Mar-Apr	Mei
1	Riset awal/ Pengajuan judul										
2	Penyusunan Proposal										
3	Bimbingan Proposal										
4	Seminar Proposal										
5	Perbaikan/ ACC Proposal										

6	Pengolahan Data										
7	Penyusunan Skripsi										
8	Bimbingan Skripsi										
9	Seminar Hasil										
10	Perbaikan Seminar Hasil										
11	Sidang Meja Hijau										

Sumber: Penulis 2023

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Desa dan Perwakilan Warga Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba yang berjumlah 40 orang.

Tabel 3.2 Data Populasi Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Parasman Silaen	Kepala Desa	Laki-laki	60	SMA
2	Ronalis P Silaen	Sekretaris Desa	Laki-laki	43	SMA
3	Tagor S Pane	Kaur Keuangan	Laki-laki	43	SMA
4	Johanes Pane	Kaur Perencanaan	Laki-laki	45	SMA
5	Lidia Pardosi	Kaur Tata Usaha	Perempuan	36	D3
6	Patar Sitorus	Kasi Pemerintahan	Laki-laki	55	SMA
7	Nursiana Pardosi	Kasi Kesejahteraan	Perempuan	38	D3
8	Benni N J Silaen	Kasi Pelayanan	Laki-laki	41	SMA
9	Fransisko Panjaitan	Kadus I	Laki-laki	38	SMA

10	Berko Pane	Kadus II	Laki-laki	41	SMA
11	Jonner Pardosi	Kadus III	Laki-laki	45	SMA
12	Eddy Pane	Ketua BPD	Laki-laki	60	SMA
13	Marihot Pane	Wakil Ketua BPD	Laki-laki	54	SMA
14	Rumeni Pasaribu	Sekretaris BPD	Perempuan	37	SMA
15	Henderik Silaen	Anggota BPD	Laki-laki	41	SMA
16	Edward Pane	Anggota BPD	Laki-laki	43	SMA
17	Armin Silaean	Pembina LKMD	Laki-laki	59	D3
18	Hizkia Pane	Penasehat LKMD	Laki-laki	58	D3
19	Alboin Silaen	Ketua LKMD	Laki-laki	44	SMA
20	Hahotan Silaen	Sekretaris LKMD	Laki-laki	39	SMA
21	Nelly Tampubolon	Bendahara LKMD	Perempuan	38	D3
22	Evendi Samosir	Bidang Lingkungan Hidup	Laki-laki	40	D3
23	B Frengky Pane	Bidang Pembangunan Desa	Laki-laki	41	SMA
24	Helder Pardosi	Bidang Ketentraman Masyarakat	Laki-laki	47	SMA
25	Bolpen Pane	Bidang Kerohanian	Laki-laki	41	SMA
26	Nurlia Pane	Ketua PKK	Perempuan	47	SMA
27	Rumintan Silaen	Wakil Ketua PKK	Perempuan	44	SMA
28	Ester Sibarani	Sekretaris PKK	Perempuan	41	SMA
29	Berliana Hutapea	Bendahara PKK	Perempuan	39	D3
30	Sonti Tampubolon	Pokja I	Perempuan	45	SMA
31	Melda Silaen	Pokja II	Perempuan	40	SMA
32	Selvia Pardosi	Pokja III	Perempuan	41	SMA
33	Melati N Pardosi	Perwakilan Warga	Perempuan	41	SMA
34	Sondang Pane	Perwakilan Warga	Laki-laki	58	SMA
35	Jonggi Pane	Perwakilan Warga	Laki-laki	60	SMA
36	Anita Sipahutar	Perwakilan Warga	Perempuan	36	SMA
37	Hoddi Sibarani	Perwakilan Warga	Laki-laki	43	SMA
38	Tiamsa Pardosi	Perwakilan Warga	Perempuan	60	SMA
39	Elmeria Panjaitan	Perwakilan Warga	Perempuan	59	SMA
40	Tinggi Panjaitan	Perwakilan Warga	Laki-laki	58	SMA

Sumber: Kantor Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Diolah (2023)

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2022). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan Total Sampling, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan jumlah populasi pada penelitian ini memenuhi kriteria sebagai responden. Sehingga sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu seluruh populasi menjadi sampel sebanyak 40 orang. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu seluruh Aparatur Desa dan Perwakilan Warga Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.

3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel indeviden (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).

1. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2016). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependent atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:68). Variabel terikat dari penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

3.4.2 Defenisi Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk menjabarkan variabel penelitian. Defenisi operasional variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015).

Tabel. 3.3 Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
1	Tranparansi (X ₁)	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur desa - laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu - informasi mengenai keberhasilan pencapaian desa dalam laporan keuangan 	Transparansi ialah keterbukaan mengenai tindakan serta kebijakan oleh pemerintah. Prinsip transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dengan masyarakat dengan penyediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat serta memadai.	Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator 3 aspek pelaksanaan dan 2 aspek Pengumuman kebijakan diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chrystiana, 2017).
2	Akuntabilitas (X ₂)	<ul style="list-style-type: none"> - program dan kebijakan - aparat dan pemimpin - kegiatan atau program selesai dilaksanakan - Melakukan pengecekan terhadap jalannya program. 	akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut.	Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator 3 aspek pelaporan dan 2 aspek pengawasan dan pertanggungjawaban diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chrystiana, 2017).
3	Pengelolaan Keuangan Desa(Y)	<ul style="list-style-type: none"> - perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa - Pengorganisasian dalam pengelolaan keuangan desa - Pelaksanaan pengelolaan keuangan 	pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.	Instrumen 56 butir pernyataan dengan indikator 18 aspek perencanaan, 21 aspek pelaksanaan, 7 aspek penatausahaan dan 3 aspek pelaporan serta 7 aspek pertanggung jawaban diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chrystiana,2017)

Dalam penelitian ini metode dalam pengambilan data yang diperoleh dari jawaban responden dengan menggunakan skala likert. Kuisoner yang disebarakan memakai skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk analisis data kuantitatif, maka jawaban responden diberi skor sebagai berikut:

Tabel 3.4 Skala Likert

Kriteria	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Ragu/Netral/Kurang Setuju(KS)	3
Setuju(S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: skala likert

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer, adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan data kuantitatif. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan Desa di desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba. Sumber data diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner yang disebar dalam penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai Pemerintah desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawab (Sugiyono, 2022). Selain itu didalam penelitian ini juga menggunakan wawancara dalam mengumpulkan data kepada pegawai Pemerintah desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal –hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2022).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. (Sugiyono, 2017). Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.7.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrument atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada instrumen atau kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51).

Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Didalam menentukan layak dan tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif, maka variabel tersebut dinyatakan valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ dan maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2018:45) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan dalam mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner untuk penggunaan yang berulang.

Dalam mencari reliabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis Cronbach Alpha untuk menguji reliabilitas, alat ukur yaitu kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, pengetahuan auditor serta *audit judgment*. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghazali (2018:46), yaitu jika koefisien Cronbach Alpha $> 0,70$ maka pertanyaan dinyatakan andal atau suatu konstruk maupun variabel dinyatakan reliabel. Sebaliknya, jika koefisien Cronbach Alpha $< 0,70$ maka pertanyaan dinyatakan tidak andal.

Pehitungan reliabilitas formulasi Croanbach Alpha ini dilakukakan dengan bantuan program IBM SPSS 26.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dianalisis dengan metode analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedatisitas.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistic.

1. Analisis Grafik

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2018:163). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis grafik adalah:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Kolmogorof-Smirnov

Uji ini didasarkan kepada Kolmogorof-Smirnov Test terhadap model yang diuji. Uji Kolmogorof-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis:

Ho: data residual terdistribusi normal, apabila $\text{sig. 2-tailed} > \alpha + 0,05$

Ha: data residual tidak terdistribusi normal, apabila $\text{sig. 2-tailed} < \alpha + 0,05$

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat digunakan nilai tolerance atau *variance inflation factor* (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $\text{VIF} = 1/\text{Tolerance}$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $\text{Tolerance} \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} \geq 10$. Jika nilai $\text{tolerance} > 0,10$ atau nilai $\text{VIF} < 10$ maka hal tersebut menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

- a. Nilai $\text{Tolerance} \leq 0,10$ dan $\text{VIF} \geq 10$, maka terjadi gejala multikolinearitas.
- b. Nilai $\text{Tolerance} \geq 0,10$ dan $\text{VIF} \leq 10$, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat atau dependen yaitu SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized. Dengan dasar analisis sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda adalah Analisis yang dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Adapun rumus yang digunakan dalam regresi linear berganda yaitu (Erwan & Diyah, 2017):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (variabel dependen/terikat)

a = Intersep/Bilangan Konstanta

b = Koefisien Variabel X

X₁ = Akuntabilitas (variabel independen/bebas)

X₂ = Transparansi (variabel independen/bebas).

e = Kesalahan Regresi (error)

3.7.4 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris. (Erwan & Dyah, 2017).

1. Uji t (Parsial)

Uji terhadap nilai statistic t merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai statistic t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya. Uji terhadap nilai statistic t juga disebut uji parsial yang berupa koefisien regresi. Kita dapat melakukan uji ini dengan mudah dan singkat sesuai SPSS. Pertama, kita harus merumuskan hipotesis nol yang hendak diuji, (Erwan & Dyah, 2017) yaitu:

Ho: $\beta = 0$, artinya variable independen bukan merupakan penjelasan variabel dependen.

Ha: $\beta \neq 0$, artinya variabel independen merupakan penjelasan variabel dependen.

Jika nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variabel independen secara individual merupakan penjelas variabel dependen.

2. Uji F (Simultan)

Nilai statistic F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam persamaan/model regresi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai statistic F juga dapat dilihat dari output regresi yang dihasilkan oleh SPSS. Seperti uji nilai statistic t , kita hendaknya merumuskan uji hipotesis nol untuk uji nilai statistic F (Erwan & Dyah, 2017) yaitu:

H_0 : $\beta = 0$, artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas variabel dependen.

H_a : $\beta \neq 0$, artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai statistic F lebih besar dari 4 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Semua variabel independen yang dimasukkan dalam persamaan/model regresi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan " R^2 " pada prinsipnya mengukur seberapa besar kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen. Jadi koefisien determinasi sebenarnya mengukur besarnya persentase pengaruh semua variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependennya.

Besarnya nilai koefisien determinasi berupa persentase, yang menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Apabila nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Atau dengan kata lain, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai R^2 semakin mendekati 100% berarti semua variabel independen dalam model memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependennya atau semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Misalnya nilai $R^2 = 0,85$, artinya bahwa variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi adalah 85% dan selebihnya atau sebesar 15%, variasi variabel Y dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi (Erwan & Dyah, 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran dan Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Desa Taon Marisi

Desa Taon Marisi adalah salah satu desa dari 21 (dua puluh satu) desa + Kelurahan di Kecamatan Habinsaran. Desa Taon Marisi terletak bersebelahan dengan kelurahan Parsoburan Tengah dan memiliki luas Desa ± 551 Ha dibagi 3 (tiga) dusun yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Adapun mata pencaharian di Desa Taon Marisi mayoritas Petani, Pekebun dan Sawah, sehingga taraf hidup masih tergolong rendah dan juga sarana-prasarana belum juga berkembang khususnya dibidang pertanian.

Desa Taon Marisi merupakan salah satu desa di Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara memiliki luas ± 551 Ha. Secara geografis Desa Taon Marisi berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Lumban Ruhap
- b) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kelurahan Parsoburan Tengah
- c) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Lumbanrau Barat
- d) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Tornagodang

Secara administratif, wilayah Desa Taon Marisi terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu:

- a) Dusun 1 (satu)
- b) Dusun 2 (dua)

c) Dusun 3 (tiga)

Secara umum Tipologi Desa Taon Marisi terdiri dari areal Pertanian, kebun dan persawahan. Topografis Desa Taon Marisi secara umum termasuk daerah pegunungan, berdasarkan ketinggian wilayah Desa Taon Marisi diklarifikasi kepada dataran tinggi.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Taon Marisi

No	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK
1	Dusun I	67 Jiwa	81 Jiwa	38
2	Dusun II	108 Jiwa	90 Jiwa	59
3	Dusun III	69 Jiwa	81 Jiwa	36
Jumlah		244 Jiwa	253 Jiwa	132

Sumber: Data Desa Taon Marisi diolah (2023)

4.1.2 Visi dan Misi Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba

a. Visi Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba

Adapun visi Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba yaitu Mewujudkan Masyarakat Desa Taon Marisi yang mandiri, sejahtera dan bermartabat.

b. Misi Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba

Adapun beberapa misi yang telah dituangkan sebagai berikut:

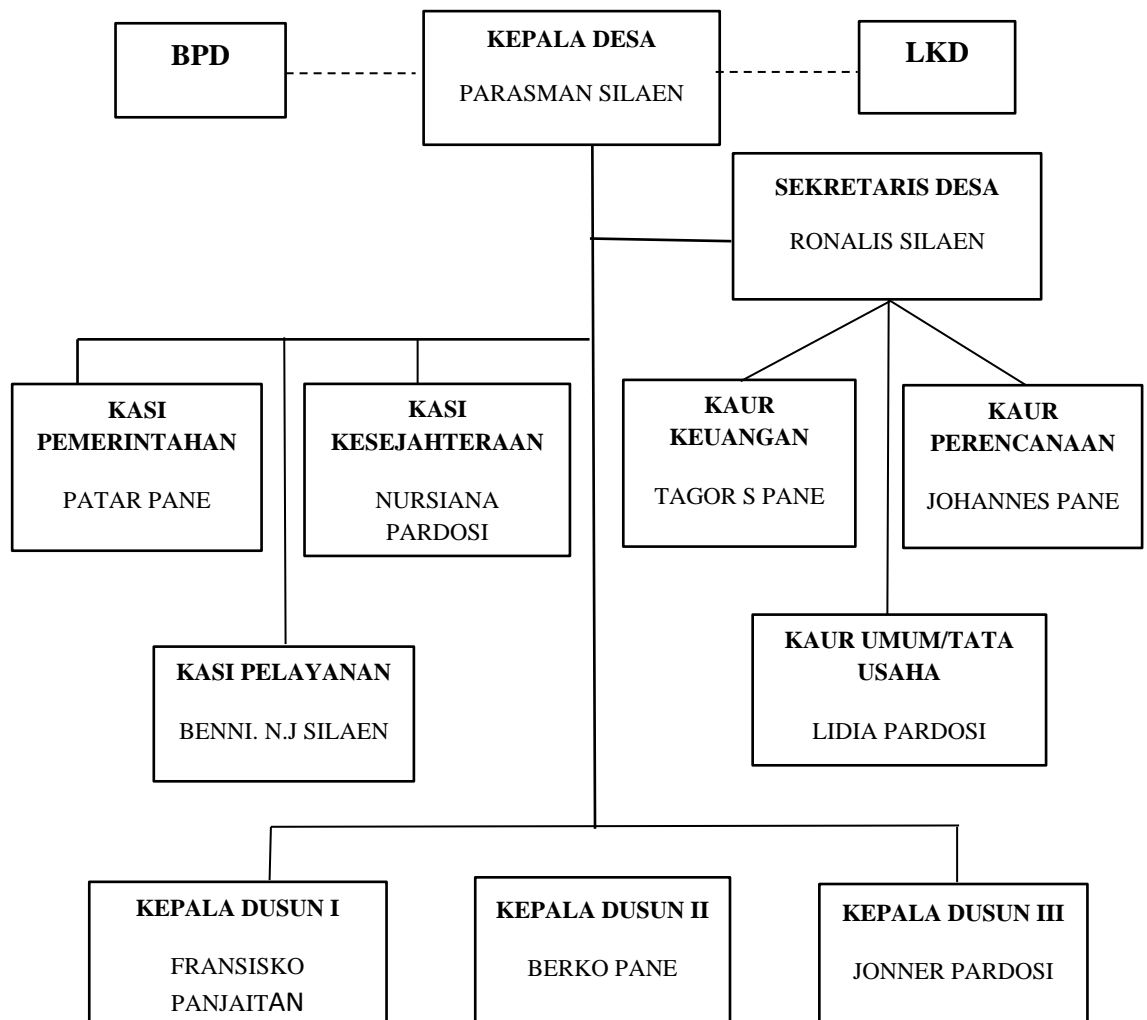
1. Mewujudkan pemerintahan yang mandiri, bersih dan berwibawa
2. Meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui Pendidikan, kesehatan dan pendapatan/pertanian
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
4. Mewujudkan pengembangan ekonomi rakyat miskin.

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba

Adapun struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam struktur organisasi terdapat kerangka yang menggambarkan wewenang, tanggung jawab, dan hubungan tiap bagian yang ada didalamnya. Struktur organisasi dapat memudahkan untuk menentukan dan mengarahkan serta mengawasi suatu kegiatan. Struktur organisasi Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran dan strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan Pemerintahan Desa.

Pada Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba, Kepala Desa menjabat sebagai pemimpin Desa dan langsung membawahi Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kasi Pelayanan, Kasi Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Umum/Tata Usaha, Kepala Dusun, dan BPD. Kerangka struktur organisasi pada Pemerintah Desa dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA TAON MARISI



Sumber: Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba (2023)

Berikut ini merupakan uraian tugas dari pemerintah desa:

1. Kepala Desa Menurut UU RI No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Sekretaris Desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris desa yaitu menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta tugas lain yang diberi oleh kepala desa.
3. Kaur Keuangan berfungsi untuk membantu Sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan keuangan desa dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
4. Kaur Perencanaan berfungsi untuk membantu Sekretaris Desa dalam mengkoordinasikan urusan-urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, data-data dalam rangka pembangunan, melakukan, monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa yang ada di setiap pedesaan.
5. Kaur Umum/Tata Usaha berfungsi untuk melaksanakan urusan ketaatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
6. Kasi Pemerintahan berfungsi untuk melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

7. Kasi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
8. Kasi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
9. Kepala Dusun bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
10. BPD menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55 berfungsi untuk membahas dan menyepakati sebuah Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

4.2 Penyajian Data

Dalam penelitian ini yaitu tentang “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba” diperoleh dengan cara menyebar kuesioner dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Demografi Responden

Uraian		Frekuensi	Persentase %
Jenis Kelamin	Laki-laki	25	63%
	Perempuan	15	38%
	Jumlah	40	100%
Usia	35 - 40 tahun	10	25%
	41 - 45 tahun	17	43%
	46 -50 tahun	2	5%
	> 50 tahun	11	28%
	Jumlah	40	100%
Pendidikan Terakhir	SMA	33	83%
	D3	7	18%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini lebih banyak yaitu sebesar 63% dibandingkan jumlah responden perempuan yang hanya sebesar 38%. Dari usia dominan berusia 41-45 tahun yaitu sebesar 43%, usia > 50 tahun sebesar 28%, usia 35-40 tahun sebesar 25% dan terakhir usia 46-50 tahun yaitu sebesar 5%. Selanjutnya berdasarkan Pendidikan terakhir didominasi oleh tamatan SMA yaitu sebesar 83% dan tamatan D3 sebesar 18%.

4.3 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan program *Statistical Package Social Sciences* (SPSS). Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisis penelitian mengenai Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan

Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba. Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang perangkat desa. Kuesioner disebarakan langsung kepada responden menggunakan angket. Setelah data hasil jawaban kuesioner diperoleh, dilakukan pengolahan data yaitu untuk mendapatkan hasil pengujian. Pengolahan data dilakukan menggunakan *software SPSS versi 26*.

4.4 Hasil Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas Data

Uji validitas merupakan tahap awal yang dilakukan setelah data dari kuesioner diperoleh. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Pearson correlation* dengan bantuan *Software SPSS Statistic 26*. Teknik uji validitas *item* dengan *Pearson correlation* yaitu dengan cara mengkorelasikan skor *item* dengan skor totalnya. Pedoman dalam pengambilan keputusan apakah data yang diperoleh valid atau tidak dengan kriteria sebagai berikut (Ghozali:2018):

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif, maka variabel tersebut dinyatakan valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid.

Suatu *item* dinyatakan valid apabila *Pearson correlation* r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} pada taraf signifikan $< 0,05$. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah, dimana r_{tabel} adalah nilai yang didapat dari rumus df (degree of freedom) = $n - 2$. Maka $df = 40 - 2 = 38$ (dimana n merupakan jumlah data).

Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Transparansi (X₁)

Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Transparansi 1	0,628	0,312	Valid
Transparansi 2	0,477	0,312	Valid
Transparansi 3	0,640	0,312	Valid
Transparansi 4	0,464	0,312	Valid
Transparansi 5	0,471	0,312	Valid
Transparansi 6	0,502	0,312	Valid
Transparansi 7	0,464	0,312	Valid
Transparansi 8	0,485	0,312	Valid
Transparansi 9	0,665	0,312	Valid
Transparansi 10	0,506	0,312	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS 26 (2023)

Tabel 4.3 adalah hasil uji validitas untuk variabel Transparansi (X₁) dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pertanyaan mengenai Transparansi memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka *item-item* pertanyaan pada variabel Transparansi dinyatakan valid.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X₂)

Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Akuntabilitas 1	0,449	0,312	Valid
Akuntabilitas 2	0,538	0,312	Valid
Akuntabilitas 3	0,702	0,312	Valid
Akuntabilitas 4	0,566	0,312	Valid
Akuntabilitas 5	0,474	0,312	Valid
Akuntabilitas 6	0,526	0,312	Valid
Akuntabilitas 7	0,560	0,312	Valid
Akuntabilitas 8	0,544	0,312	Valid
Akuntabilitas 9	0,440	0,312	Valid
Akuntabilitas 10	0,448	0,312	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS 26 (2023)

Tabel 4.4 adalah hasil uji validitas untuk variabel Akuntabilitas (X₂) dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pertanyaan mengenai Akuntabilitas memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka *item-item* pertanyaan pada variabel Akuntabilitas dinyatakan valid.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Desa 1	0,477	0,312	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa 2	0,546	0,312	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa 3	0,612	0,312	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa 4	0,452	0,312	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa 5	0452	0,312	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa 6	0,531	0,312	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa 7	0,470	0,312	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa 8	0,437	0,312	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa 9	0,714	0,312	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa 10	0,509	0,312	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS 26 (2023)

Tabel 4.5 adalah hasil uji validitas untuk variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pertanyaan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka *item-item* pertanyaan pada variabel Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan dalam mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner untuk penggunaan yang berulang. Uji realibilitas data dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* dimana suatu variabel dikatakan reliabel bila memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,70$. Sebaliknya jika koefisien *Chronbach's Alpha* $< 0,70$ maka variabel dikatakan tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas data dilakukan dengan bantuan *Software SPSS Statistic 26* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Chronbach's Alpha</i> (CA)	N of Items	Batas CA	Keterangan
Transparansi (X1)	0,715	10	0,7	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,706	10	0,7	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,702	10	0,7	Reliabel

Sumber: Data Diolah SPSS 26 (2023)

Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk tiga variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2), dan Pengelolaan Keuangan (Y). Berdasarkan tabel diatas, hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha (CA) menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tingkat reliabilitas di atas batas yang ditetapkan, yaitu 0,7. Dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel ini dapat dianggap reliabel dalam mengukur konstruk yang ingin diteliti. Dengan kata lain, instrumen yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat konsistensi yang memadai, sehingga dapat diandalkan untuk pengumpulan data dan analisis selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk memenuhi persyaratan model regresi bahwa data yang diperoleh memiliki sifat normal. Uji normalitas diujikan pada nilai residual semua variabel penelitian yang meliputi: Transparansi dan Akutabilitas (*Independent*) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (*dependent*). Pengujian normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dan untuk perhitungannya menggunakan bantuan *Software SPSS Statistic 26*. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$ dan data berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikansi $< 0,05$.

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.74428256
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.111
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

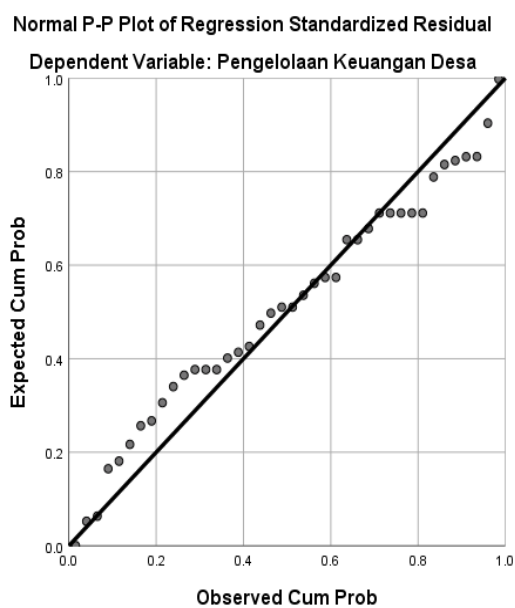
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah SPSS 26 (2023)

Tabel 4.7 diatas menunjukkan hasil uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi dasar dalam analisis statistik.

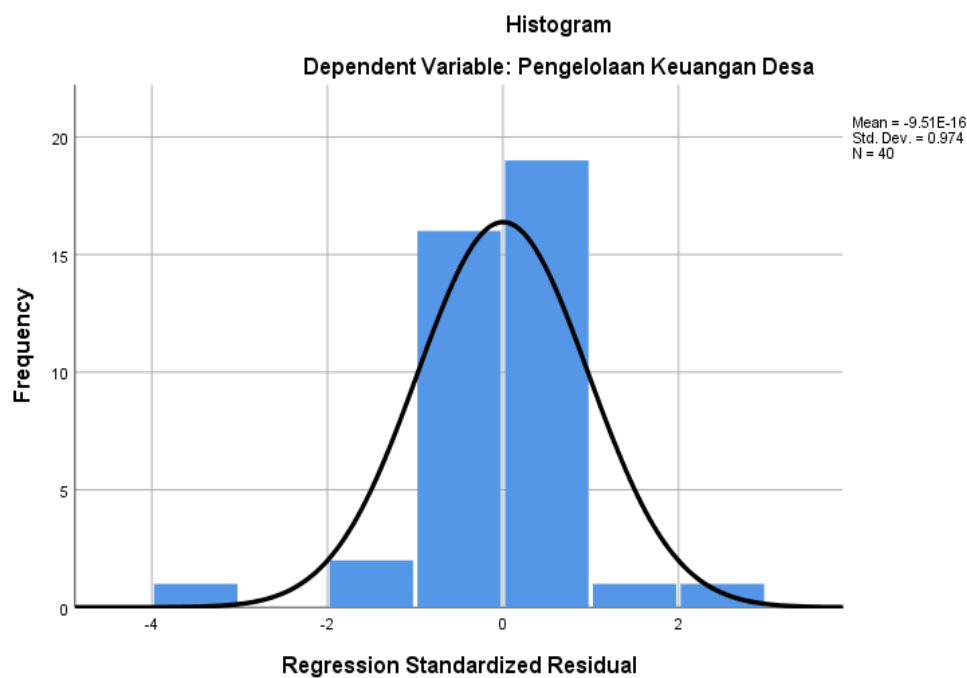
Gambar 4.2 Uji Normalitas P-P Plot



Sumber: Data Diolah SPSS 26 (2023)

Berdasarkan Gambar 4.2 uji normalitas dengan menggunakan grafik normal P-P Plot terlihat bahwa data menyebar disekitar garis. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan analisis grafik adalah suatu data dikatakan mempunyai sebaran normal apabila data tersebar di sekitar garis. Maka hal ini menunjukkan bahwa penelitian diatas memiliki sebaran data normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.3 Uji Normalitas Histogram



Sumber: Data Diolah SPSS 26 (2023)

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian telah berdistribusi normal, karena dapat dilihat dari grafik tersebut menunjukkan pola distribusi normal (menyerupai lonceng).

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan korelasi antara variabel independent dalam model regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas adalah jika Nilai *Tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 , maka terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya jika Nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka tidak terjadi gejala multikoliniearitas.

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Transparansi (X_1)	0,245	4,083	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Akuntabilitas (X_2)	0,245	4,083	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Diolah SPSS 26 (2023)

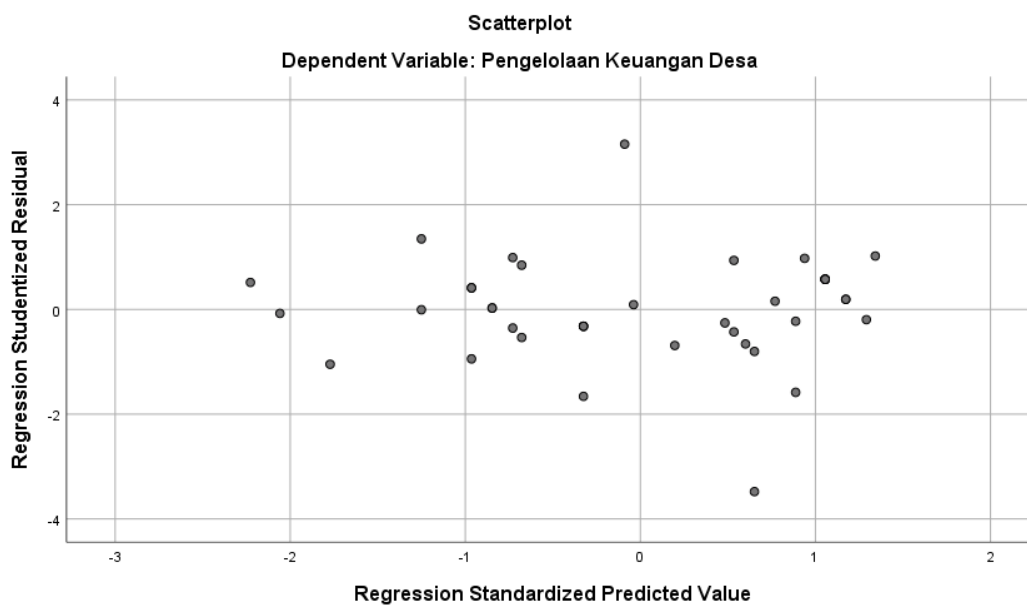
Berdasarkan hasil tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* dan *VIF* variabel Transparansi (X_1) dan variabel Akuntabilitas (X_2) memiliki nilai *Tolerance* $0,245 > 0,10$ dan *VIF* $4,083 < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini pengujian Heteroskedastisitas menggunakan uji *Scatterplot* dengan bantuan *Software SPSS Statistic 26* dengan melihat nilai prediksi variabel indevenden yaitu *ZPRED* dengan residunya *SRESID*. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas *Scatterplot* yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada akan membentuk pola tertentu yang teratur

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Diolah SPSS 26 (2023)

Berdasarkan gambar 4.4, dapat diketahui bahwa pada grafik *Scatterplot* tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk melihat hasil analisis regresi linear sederhana pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba pada responden

sebanyak 40 orang maka dilakukan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Software SPSS Statistic 26* maka didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.058	2.311		.458	.650
	Transparansi	.691	.096	.702	7.171	.000
	Akuntabilitas	.284	.099	.281	2.868	.007

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa
 Sumber: *Data Diolah SPSS 26 (2023)*

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, didapat hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 1,058 + 0,691X_1 + 0,284X_2 + e$$

Penjelasan dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) adalah 1,058 ini dapat diartikan jika Transparansi dan Akuntabilitas nilainya adalah 0, maka Pengelolaan Keuangan Desa nilainya sebesar 1,058.
- Nilai koefisien regresi variabel Transparansi (b_1X_1) bernilai positif sebesar 0,691 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Transparansi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba sebesar 69,1 satuan dengan asumsi bahwa semua variabel lain bernilai tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas (b_2X_2) bernilai positif sebesar 0,284 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Akuntabilitas sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa

Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba sebesar 28,4 satuan dengan asumsi bahwa semua variabel lain bernilai tetap.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji t (Parsial)

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara individu variabel bebas (X_1, X_2) yang ada didalam model terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4.10 Hasil Uji t

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.058	2.311		.458	.650
	Transparansi	.691	.096	.702	7.171	.000
	Akuntabilitas	.284	.099	.281	2.868	.007

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa
 Sumber: Data Diolah SPSS (2023)

Dari tabel 4.10 hasil pengujian diperoleh t_{hitung} dari masing-masing variable bebas. Untuk kriteria Uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan nilai t, untuk (df) = $n-k-1$ atau (df) = $40-3-1$ maka diperoleh t_{tabel} 2.028. Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- 1) Diperoleh t_{hitung} Transparansi = 7.171 maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $7.171 > 2.028$, nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa variabel Transparansi (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran.

- 2) Diperoleh t_{hitung} Akuntabilitas =2.868 maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau 2.868 >2.028, nilai signifikansi $0,007 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa variabel Akuntabilitas (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran.

4.7.2 Uji F (Simultan)

Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas. Dalam pengujian ini nilai yang digunakan adalah nilai F dan nilai sig yang terdapat dalam tabel *anova* yang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.11 Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	227.371	2	113.685	194.700	.000 ^b
	Residual	21.604	37	.584		
	Total	248.975	39			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data Diolah SPSS (2023)

Berdasarkan dari tabel 4.11 menunjukkan hasil Uji F dimana didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05. Selain itu diketahui nilai F_{hitung} sebesar 194.700 yakni lebih besar dari F_{tabel} 3.25. dimana F_{tabel} diperoleh dari $(df) = k-1; n-1$ atau $(df) = 3-1; 40-3 = 3.25$.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan (Bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.

4.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) atau R Square menjelaskan seberapa besar variabel independen (X) mampu menjelaskan variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi berkisar di antara nol sampai dengan satu. Komponen-komponen yang terkait dapat dilihat pada tabel model summary di bawah ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.956 ^a	.913	.909	.764

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data Diolah SPSS (2023)

R Square adalah 0,913 artinya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent pada penelitian ini sebesar: 91,3% sedangkan sisanya 8,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model regresi dalam penelitian ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa X_1 - X_2 berpengaruh sebesar 91,3% terhadap Y, sedangkan 8,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

4.8 Pembahasan

1. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, hipotesis pertama menyatakan “Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba”, terbukti bahwa Transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini ditunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $7.171 > 2.028$, nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa variabel

Transparansi (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ediska Harosa Putri, Witra Maison, dan Rita Dwi Putri (2022) yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Seluruh Nagari Di Kecamatan X Kota Singkarak Kabupaten Solok) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $9,823 > t_{tabel}$ $1,673$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang menyatakan Transparansi (X_1) berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Dari hasil penelitian mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba terlihat bahwa transparansi yang dilakukan Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa seluruh laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban dicatat dan dilaporkan kepada Camat melalui Bupati/Walikota, dan adanya papan pengumuman mengenai APBDes.

Hasil penelitian diatas tidak sesuai dengan penelitian (Andika Subandra, Usdeldi, dan Eri Nofriza/2022) yang berjudul “Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa” hasil penelitian yang diperoleh adalah Hasil uji t pada variabel transparansi (X_1) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) pada Desa Pebinaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil perhitungan uji parsial diperoleh hasil t_{hitung} $0,274$ dengan sig sebesar $0,785 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel transpatansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Pebinaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Secara teori sebenarnya transparansi harus berpengaruh terhadap pengelolaan

keuangan desa, namun secara pengalaman empiris dilapangan masyarakat khususnya pada Desa Pebenaan tidak ingin tahu persoalan perencanaan, pelaksanaan maupun pengelolaan keuangan desa. Oleh karna itu sesuai dengan uji statistik yang telah dilakukan sejelan dengan keadaan yang ada dilapangan. Sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa Pebenaan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Good Governance pada tinjauan pustaka dimana Desa Taon Marisi sudah melaksanakan transparansi yang baik dengan memberikan informasi mengenai laporan keuangan desa seluas – luasnya atau terperinci baik dari bentuk laporan keuangan desa, cara pengkodeaannya dan penyusunannya kepada masyarakat atau publik dan kinerja para aparatur desanya agar tidak terjadi adanya tindakan korupsi atau penyelewengan dana dan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur desa karena kurangnya transparansi atau keterbukaan terhadap publik. Jika transparansi tidak dilakukan sesuai dengan undang – undang, dan observasi maka desa tersebut dapat dikatakan kurang transparan. Hal ini bisa menyebabkan desa atau daerah tersebut kurang berkembang.

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, hipotesis kedua menyatakan “Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba”, terbukti bahwa Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini ditunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2.868 > 2.028$, nilai signifikansi

0,007<0,05. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa variabel Akuntabilitas (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andika Subandra, Usdeldi, dan Eri Nofriza (2022) yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Pebenaan Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4.903 dengan sig sebesar 0,000<0,05 artinya akuntabilitas (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) pada Desa Pebenaan. Dari hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba terlihat bahwa seluruh kegiatan yang mengenai akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa seluruh kegiatan akuntabilitas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian diatas tidak sesuai dengan penelitian (Lara Aryanti/2022) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman” memperoleh hasil statistic uji t untuk variable akuntabilitas (X_1) diperoleh t_{hitung} 0,564 dan t_{tabel} sebesar 1,745, karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,564 < 1,745), sedangkan untuk signifikan lebih besar dari 0,05 (0,581 > 0,05). Maka H_0 1.1 diterima dan H_a 1.2 ditolak, artinya bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di

Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Good Governance* pada tinjauan pustaka Desa Taon Marisi karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Dari hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa secara bersama-sama Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Keuangan Desa dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05. Selain itu diketahui nilai F_{hitung} sebesar 194.700 yakni lebih besar dari F_{tabel} 3.25. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan (Bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019) diperoleh nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%), yaitu $0,000 < 0,05$. Selain itu hasil perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 11,726 sedangkan nilai $F_{tabel} \pm 3,16$. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $11,726 > 3,16$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh

signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Good Governance* pada tinjauan pustaka Desa Taon Marisi karena Desa Taon Marisi telah melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba, maka dapat disimpulkan bahwa “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba”.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa variabel Transparansi (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi dianggap penting dalam pengelolaan keuangan desa, hasil penelitian ini mendukung hubungan yang kuat antara tingkat transparansi dan kualitas pengelolaan keuangan desa.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas juga berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Taon Marisi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,007 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa variabel Akuntabilitas (X_2) secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05. Selain itu diketahui nilai F_{hitung} sebesar 194.700 yakni lebih besar dari F_{tabel} 3.25. Transparansi dan Akuntabilitas mampu menjelaskan variasi yang signifikan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Taon Marisi. Oleh karena itu, pengaruh bersama-sama dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini juga terbukti secara statistik.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Desa Taon Marisi perlu meningkatkan kelengkapan laporan setiap kegiatan yang dilakukan dalam memperjelas Pembangunan desa untuk kesejahteraan Masyarakat.
2. Hendaknya Perangkat Desa meningkatkan akses mengenai laporan pengelolaan keuangan desa kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Andika, S. Usdeldi, & Eri, N (2022). *Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*. *JAAB: Jurnal of Applied Accounting And Business* Vol.4 No.2.
- Ardiyanti, T. (2018). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Basri. (2014). *Indeks Pembangunan Desa: Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik.
- Chabib, S., & Heru, R. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Chrystiana, Ema. 2017. *Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- David, M. K., & Steven, E. K. (2020). *Transparency and trust in government: Evidence from a survey experiment*. *Public Administration Review*, 80(1), 128-138.
- Ediska, H. P., Witra, M., & Rita, D. P. (2022). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Seluruh Nagari Di Kecamatan X Kota Singkarak Kabupaten Solok)*. *CEMERLANG – Vol. 2, No. 3*.

- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 8(1), 19-27.
- Gayatri, Made Yeni Latrin, Ni Luh Sari Widhiyani (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, JEKT 10 [2] : 175-182. pISSN : 2301 – 8968
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 2*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamirul, Alamsyahril (2020). *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. Malang, Pustaka Learning Center, CV.
- Harjono, dkk. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran*. Binus Business Review. Vol.5, No.2, Hlm.537-550.
- Hendratami H., Mulyadi, Widiastuti R., (2017). *Pengaruh Transparansi dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, [online] Vol. 3, No.2.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Indriyani, I. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan*. Skripsi: FE Unmuh Ponorogo.
- Izzah, H. (2018). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Dadang, K. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

- Lapananda, Yusran. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.
- Lara Aryanti. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Berdemokrasi ke Depan*. Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sektor Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- M.Baharudin Umar. (2019). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Se Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo*. Skripsi, 1(921415075).
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.

- Riska, D. A. (2021). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desatamalate Kabupaten Takalar*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Erwan, A. P. & Dyah, R. S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media
- Risya, U and Nurodin, I (2017) *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen), 6 (11). pp. 74-80. ISSN 2088-6969
- Riyanto. (2015). “*Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah*”. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 2 Juli 201: 110-12.
- Rizal, Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016*. Jurnal ALIQTISHAD, 14(1), 20–37. Retrieved from <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/5457>
- Rosmawati, R., & Idris, A. F. (2021). *Analisis Laporan Keuangan Desa Sebagai Alat Ukur Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2(2), 171-180.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.

SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.

Setyoko. (2017). *Konsep dan Definisi Konseptual*. Jakarta: Rineka Cipta

Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.

Sugiono, (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sujarweni V Wiratna. (2015). *"Akuntansi Desa."* Yogyakarta. Pustaka Baru Press.

Sukmawati F., Nufitriani A., (2019). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Garut)*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM, Vol.2, No.1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik

Wicaksono, G., Pamungkas, T. S., & Anwar. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi*. 21(1), 12–22.

Widyanti, R. (2018). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis*. Lppm Umsb, 12(11)

World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank Policy Research Department.

Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.